

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Tuhan Yang Maha Esa telah menganugerahi bangsa Indonesia kekayaan berupa sumber daya yang terdiri atas sumber daya manusia, sumber daya alam hayati, sumber daya alam nonhayati, dan sumber daya buatan. Sumber daya alam dan buatan yang dapat dijadikan objek dan daya tarik wisata berupa keadaan alam, flora dan fauna, hasil karya manusia, serta peninggalan sejarah dan budaya yang merupakan modal bagi pengembangan dan peningkatan kepariwisataan di Indonesia.

Modal tersebut perlu dimanfaatkan secara optimal melalui penyelenggaraan kepariwisataan yang ditujukan untuk meningkatkan pendapatan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, memperluas dan pemeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, mendorong pembangunan daerah, memperkenalkan dan mendayagunakan objek dan daya tarik wisata di Indonesia, serta memupuk rasa cinta tanah air dan mempererat persahabatan antar bangsa.

Untuk mencapai keberhasilan penyelenggaraan kepariwisataan dimaksud, diperlukan langkah-langkah yang serasi antar semua pihak yang terkait, baik Pemerintah maupun masyarakat, sehingga terwujud keterpaduan lintas sektoral. Dalam usaha mengembangkan dan meningkatkan penyelenggaraan

kepariwisataan, dilakukan pembangunan objek dan daya tarik wisata, baik dalam bentuk mengusahakan objek dan daya tarik wisata yang sudah ada maupun membuat objek-objek baru sebagai objek dan daya tarik wisata.

Penyelenggaraan kepariwisataan tersebut dilaksanakan dengan tetap memelihara kelestarian dan mendorong upaya peningkatan mutu lingkungan hidup serta objek dan daya tarik wisata itu sendiri, nilai-nilai budaya bangsa yang menuju ke arah kemajuan adab, mempertinggi derajat kemanusiaan, kesusilaan, dan ketertiban umum guna memperkukuh jati diri bangsa dalam rangka perwujudan Wawasan Nusantara. Oleh karena itu, pembangunan objek dan daya tarik wisata tersebut tetap harus dilakukan dengan memperhatikan :

- a. kemampuan untuk mendorong dan meningkatkan perkembangan kehidupan ekonomi dan sosial budaya;
- b. nilai-nilai agama, adat-istiadat, serta pandangan dan nilai-nilai hidup dalam masyarakat
- c. kelestarian budaya dan mutu lingkungan hidup;
- d. kelangsungan usaha pariwisata itu sendiri.

Karena sifatnya yang luas dan menyangkut kepentingan masyarakat secara keseluruhan, penyelenggaraan kepariwisataan dilaksanakan secara terpadu oleh Pemerintah, badan usaha, dan masyarakat.

Peran serta masyarakat dalam arti yang seluas-luasnya di dalam penyelenggaraan kepariwisataan ini memegang peranan penting demi terwujudnya pemerataan pendapatan dan pemerataan kesempatan berusaha. Dalam kaitannya dengan peran serta masyarakat tersebut, perlu diberikan

arahan agar pelaksanaan berbagai usaha pariwisata yang dilakukan dapat saling mengisi, saling berkaitan, dan saling menunjang satu dengan yang lainnya. Untuk mencapai maksud tersebut, Pemerintah melakukan pembinaan terhadap kegiatan kepariwisataan, yaitu dalam bentuk pengaturan, pemberian bimbingan, dan pengawasan. Kegiatan-kegiatan kepariwisataan yang menyangkut aspek pembangunan, perusahaan, dan kebijakan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah serta perkembangan yang begitu pesat di bidang kepariwisataan perlu diikuti dengan pengaturan yang sesuai dengan aspirasi bangsa Indonesia. Begitu juga pengelolaan kawasan pariwisata yang banyak dibangun di berbagai wilayah perlu mendapat pengamanan agar tidak terjadi ketimpangan terhadap masyarakat di sekitarnya, tetapi dapat mewujudkan adanya keserasian dan keseimbangan. Undang-undang kepariwisataan yang bersifat nasional dan menyeluruh sangat diperlukan sebagai dasar hukum dalam rangka pembinaan dan penyelenggaraan kepariwisataan, khususnya yang menyangkut objek dan daya tarik wisata, usaha pariwisata, peran serta masyarakat, serta pembinaannya. Undang-undang ini memberikan ketentuan yang bersifat pokok dalam penyelenggaraan kepariwisataan, sedangkan pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Sekarang ini Indonesia sedang mengalami perubahan pada hampir semua kehidupan, dimana gerakan reformasi telah mendorong secara relatif terjadinya kemajuan-kemajuan di bidang politik, sosial budaya, sosial ekonomi, dan peningkatan peran serta masyarakat di dalam kancah kehidupan bernegara Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang.

Terus melakukan upaya-upaya penyesuaian terhadap kemajuan dan perkembangan dunia, khususnya yang berkaitan dengan peningkatan SDM.

Pelestarian dan pengembangan kebudayaan dan pariwisata memiliki tujuan untuk menumbuhkan pemahaman dan perkembangan masyarakat terhadap pariwisata, meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan menumbuhkan sikap kritis terhadap fakta sejarah dan serta memperkokoh ketahanan bangsa. Untuk itu disadari bahwa pembangunan bidang kebudayaan dan pariwisata memiliki peran penting dalam memperbaiki struktur kehidupan bangsa apalagi dengan adanya persoalan yang kompleks dan bersifat multidimensional yang saat ini masih berlanjut setelah terjadinya krisis yang berkepanjangan serta meningkatnya ancaman keamanan secara global.

Demikian halnya menyangkut pihak-pihak pemerintah khususnya baik itu merupakan lapisan mulai dari tingkatan atas hingga daerah dan jajaran organisasi pemerintah yang lain, juga dituntut untuk meningkatkan kualitas kerja aparatur pemerintahannya yang tentunya berhubungan dengan tugas-tugas pemerintah dan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat. Hal tersebut merupakan konsekuensi logis terhadap fungsi dan kedudukan aparatuf pemerintah itu sendiri sebagai abdi negara dan abdi masyarakat, dikaitkan dengan tanggung jawab aparatur pemerintah dalam mensukseskan pembangunan.

Seperti yang kita ketahui Indonesia mempunyai kekayaan yang bersumber dari alam dan memiliki keanekaragaman kebudayaan, nilai adat istiadat, kebiasaan suku bangsa yang berbeda. Dengan melihat potensi tersebut diatas, maka pembangunan disektor kebudayaan dan Pariwisata perlu banyak mendapat perhatian khusus dari pemerintah.

Dengan keanekaragaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia tersebut, dapat dijelaskan sebagai bahan pengembangan sektor Pariwisata di Indonesia pada dasarnya disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:¹

1. Makin kurangnya peranan migas sebagai devisa jika dibanding dengan waktu lalu.
2. Merosotnya nilai-nilai eksport kita di sektor-sektor non migas.
3. Prospek pariwisata yang tepat memperlihatkan kecenderungan meningkatkan secara konsisten.
4. Besarnya potensi yang kita miliki bagi pengembangan Pariwisata di Indonesia.

Pembangunan sektor Pariwisata merupakan bagian dari pembangunan nasional dan terkait dengan pembangunan dan sektor-sektor lainnya. Oleh karena itu, keberhasilan pariwisata menentukan pembangunan nasional, dan pemerintah telah bertekad untuk meningkatkan pengembangan sektor Pariwisata nasional sebagai sektor pembangunan yang dapat diandalkan.

Sektor Pariwisata merupakan salah satu sektor yang diharapkan pemerintah untuk memperoleh devisa negara dari penghasilan nonmigas dan

¹ Jamer J. Spillane, *Ekonomi Pariwisata dan Prospeknya*, Kanisius, Yogyakarta, 1985, hal.57.

mampu menjadi pencetak utama devisa negara, dengan memanfaatkan Daerah Tujuan Wisata (DTW) sebagai umpan untuk menarik wisatawan yang tidak hanya terbatas mengeluarkan uang untuk berhasil datang ke daerah tujuan, juga diharapkan mampu menarik wisatawan untuk membelanjakan sebagian uangnya atas kebutuhan lain di sekitar maupun di luar sektor pariwisata. Menurut hasil riset yang pernah diadakan di Eropa baru-baru ini menunjukkan data bahwa wisatawan menyisihkan sebagian uangnya ($\pm 1/3$) untuk membeli barang-barang lokal (setempat).²

Pariwisata berperan dalam menciptakan dan memperluas lapangan kerja dan merupakan sarana efektif untuk meningkatkan pengetahuan yang lebih baik mengenai suatu negara dan budaya yang dimilikinya. Apabila suatu negara bisa mengesankan negara lain dengan warisan kebudayaannya dan mengeksponnya kebagian dunia lain, hal itu bisa memudahkan pembangunan basis yang kuat untuk memperoleh dukungan atas masalah-masalah lain.³

Salah satu sektor dari Pendapatan Asli Daerah adalah sektor pariwisata. Bukan saja dari daerah, bagi Indonesia pun industri pariwisata merupakan industri yang sangat menguntungkan dan memiliki prospek yang cerah di kemudian hari sebagai sebuah Pembangunan Nasional.⁴

Perhatian pemerintah terhadap potensi pariwisata nasional terutama sebagai penghasil devisa negara bukanlah suatu hal yang baru, terbukti dengan

² Hari, Karyono, Kepariwisata, PT. Gramedia widiasarana Indonesia, Jakarta, 1997, hal. 92-93.

³ S.L. Roy. Diplomasi, terjemahan Harwanto dan Mirsawati, Rajawali, Press Jakarta, 1995, hal.12

⁴ James Spillane, S.J. Pariwisata Indonesia : Siasat Ekonomi dan Rekayasa Kebudayaan, Kanisius, Yogyakarta, 1994, hal.19.

adanya Undang-Undang No.10 tahun 2009 yang mengatur pedoman pelaksanaan pengembangan kepariwisataan nasional.

Selain itu, ada kegiatan yang berhubungan secara langsung (seperti fasilitas rekreasi, atraksi wisata, toko-toko, dan jasa-jasa lokal) dan yang tak langsung (seperti pertanian, usaha grosir/penjualan besar dan manufaktur) dengan pariwisata.⁵

Agar sektor pariwisata dapat menjalankan peranannya sebagaimana yang diharapkan oleh pemerintah, dunia usaha maupun masyarakat umum menjadi salah satu prasyarat untuk mencapai keberhasilan pembangunan.

Pembangunan pariwisata dalam kegiatan hampir menyentuh seluruh segi kehidupan masyarakat dan merupakan kegiatan yang sangat dipengaruhi dan memerlukan dukungan hampir semua instansi pemerintah maupun dukungan masyarakat/umum yang terkoordinasi dengan mapan.

Dalam kondisi yang demikian maka dapat disimpulkan bahwa faktor manusia merupakan hal yang pokok dalam menentukan berhasil dan tidaknya suatu tujuan organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

⁵ Ibid. hal.

Adapun arah kebijaksanaan pariwisata dalam PJP II adalah :

- a. Kepariwisata nasional harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi pembangunan wilayah.
- b. Kepariwisata nasional harus berwawasan politik, sosial, ekonomi. Sosial budaya dan Hankam secara bulat dan utuh.
- c. Kepariwisata nasional harus memberikan kesempatan perusahaan dan menciptakan lapangan kerja yang seluas-luasnya bagi perorangan maupun kelompok masyarakat Indonesia.
- d. Pembangunan kepariwisataan nasional jangka panjang mampu mendorong kemandirian bangsa Indonesia dalam menyelenggarakan kepariwisataan nasional.
- e. Pembangunan kepariwisataan nasional melibatkan secara aktif berbagai sektor pemerintah, swasta dan masyarakat terpadu.
- f. Pembangunan kepariwisataan nasional harus diikuti langkah-langkah pencegahan dan penangkalan terhadap dampak negatif yang mungkin timbul.
- g. Pembangunan kepariwisataan nasional harus secara luas menggerakkan hasil produksi dalam negeri.⁶

⁶ TAP MPR No. II/MPR/1993

Pengembangan pariwisata Indonesia ini dapat dilihat dari pertahapan kegiatan pariwisata yang dilakukan pemerintah Indonesia, yaitu:⁷

1. Pada tahun 1989, Kampanye Nasional Sadar Wisata (KNSW) yang tema sentralnya sapta pesona.
2. Pada tahun 1990, Pameran Akbar Wisata Indonesia (Indo Tourism 1990)
3. Pada tahun 1991, tahun berkunjung ke Indonesia (Visit Indonesia Year 1991)
4. Pada tahun 1992, tahun berkunjung ASEAN (Visit ASEAN Year 1992), ASEAN Festival Performing Art (Prambanan Festival)
5. Pada tahun 1998, sebagai tahun seni dan budaya.
6. Pada tahun 1999, ditindak lanjuti program Indonesia Welcome You.

Pada tahun 1985 hingga 1997 pariwisata Indonesia mengalami perkembangan positif. Pada tahun 1996, misalnya Indonesia dikunjungi 5,2 juta wisatawan dan meraup penghasilan sampai 6 Milyar dollar AS.⁸

⁷ Ibid, hal.104

⁸ I Gede Ardika, Zamrud Khatulistiwa yang kurang dipromosikan, Angkasa No.9 Juni 2001 tahun XI hal. 8.

**A. LAPORAN REALISASI ANGGARAN
PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN
31 DESEMBER 2006**

| No | Uraian | Anggaran 2006 | Realisasi 2006 | % |
|----|--|-------------------------|-------------------------|--------|
| | PENDAPATAN ASLI DAERAH | | | |
| 1 | Pendapatan Pajak Daerah | 4,024,170,548.51 | 9,838,678,512.10 | 100.54 |
| 2 | Pendapatan Retribusi Daerah | 31,728,791,296.30 | 31,688,027,008.0 0 | 99.87 |
| 3 | Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 1,221,964,288.00 | 1,312,796,255.00 | 107.43 |
| 4 | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah | 9,838,678,512.10 | 12,996,403,456.4 6 | 132.10 |
| | Jumlah Pendapatan Asli Daerah | 46,813,604,644.1 | 50,043,010,324.6 | 106.90 |

Menurut Kasi Pariwisata Disperidagpar Kabupaten Majalengka, Eti K Spd kepada *Radar* beberapa waktu lalu, potensi tersebut digarap secara optimal tidak menutup kemungkinan menjadi daya tarik bagi wisatawan. Tentunya, hal itu juga

menjadi salahsatu potensi bagi pengembangan pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Majalengka.

Hal ini senada diungkapkan Sekertaris Masyarakat Pariwisata Indonesia (MPI) Kabupaten Majalengka, Ir Dadan Taofik yang bertekad menjadikan Majalengka sebagai Kabupaten Pariwisata 2010. visi tersebut, kata dia, biasa terwujud manakala ada dukungan dari semua pihak termasuk pemerintah daerah.

“ Kalau saya lihat, potensi kepariwisataan di Majalengka saat ini sesungguhnya cukup potensial jika dikembangkan. Hal itu mengingat banyak lokasi wisata yang belum tergarap secara maksimal “.

Di tempat terpisah, Bupati Majalengka, H Sutrisno SE MSi tampaknya sependapat dengan apa yang dikatakan beberapa pihak terkait potensi pariwisata di daerahnya. Bahkan, dia kini tengah merancang kawasan sindangwangi sebagai pusat agrowisata, di mana di lokasi itu akan dibangun sejumlah tempat wisata seperti kawasan wisata buah, wisata ikan, wisata bunga, dan lainnya.

Sementara itu sejumlah masyarakat Majalengka tampak antusias menyingkapi program Bupati terkait rencana penataan lokasi agrowisata. Salahsatunya seperti yang dilakukan warga di Desa/ Kecamatan Sindangwangi yang terus berbenah menata potensi wisata yang ada, salah satunya wisata Batu Luhur.⁹

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kab Majalengka pada triwulan pertama belum tercapai. Ini dikatakan Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda) Kab Majalengka Otong Subarna yang mengungkapkan target PAD Majalengka pada 2007 sebesar Rp47 miliar.

⁹ Radar Majalengka 5 Februari 2009/9 Safar 1430

Apabila dihitung secara triwulan pertama, maka targetnya sebesar Rp13 miliar. Sementara, hasil perhitungan PAD pada triwulan pertama baru masuk sekitar Rp7,7 miliar atau 15,5%. "Pendapatan asli daerah ini berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, kekayaan daerah atau BUMD (Badan Usaha Milik Daerah), serta pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.

Keempat komponen PAD tersebut baru mampu menyumbangkan sekitar 15,51% dari 25% per triwulan," ujarnya kepada SINDO, kemarin di ruang kerjanya. Menurut Oton, kekurangan PAD ini sudah tertutupi dengan dana perimbangan dari pemerintah provinsi dan pusat. Terhitung pada triwulan pertama jumlah pendapatan daerah Kab Majalengka sekitar Rp196,282 miliar dari target Rp187,867 miliar pada triwulan pertama.

Dengan demikian, lanjutnya, program atau kegiatan pemerintahan tidak mengalami kendala. Kepala Bidang Program Dispenda Kab Majalengka Wahyudin Nawawi mengatakan, langkah yang diambil Dispenda dalam rangka memperlancar penyerahan data pendapatan adalah memberikan hadiah kepada SKPD.¹⁰

Beberapa masalah yang dihadapi Sub Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pariwisata Kabupaten Majalengka, antara lain :

1. Fasilitas sarana dan prasarana obyek-obyek wisata yang masih kurang mendukung untuk memikat para pengunjung untuk datang ke obyek wisata.
2. Menurunnya pengembangan dan pembinaan di lingkungan wisata.

¹⁰ Pemerintah Kabupaten Majalengka 2006

Obyek wisata Indonesia sudah saatnya digali, diangkat dan dikemas kembali dalam kunjungan bernuansa alami, dengan melihat keunikan, kekayaan dan ketradisionalannya masyarakat pedesaan bisa kita jual untuk wisatawan. Tata cara kehidupan masyarakat, perilaku petani, kesenian khas daerah, serta kekayaan alam merupakan modal terpendam selama ini terkesan kurang disentuh oleh Dinas sektor Pariwisata Kabupaten Majalengka.

Oleh karena itu sudah sewajarnya pemerintah kabupaten Majalengka khususnya Sub Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pariwisata memberi perhatian khusus pada industri pariwisata di samping industri-industri lain yang memang banyak terdapat di Kabupaten Majalengka. Dan hal ini didukung pula oleh potensi obyek wisata alam serta budaya tradisional yang cukup besar dan potensial yang dimiliki daerah ini.

B. PERUMUSAN MASALAH

Masalah merupakan suatu kesulitan atau hambatan yang harus dihadapi, untuk memecahkannya diperlukan pengkajian, pembahasan yang bijak hingga diperoleh alternatif pemecahannya. Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan sebagai berikut : **“Bagaimana Analisis Kinerja Melalui Sektor Pariwisata Kabupaten Majalengka?”** Masalah Pariwisata yang terkait dengan PAD. Dalam upaya peningkatan dan pengelolaan sumber daya alam tata ruang dan lingkungan hidup, sektor Pariwisata ini dijadikan andalan perekonomian daerah yang berbasis sumber daya alam dan budaya yang lestari dan agamis. Oleh karena itu dalam pengelolaannya harus memiliki daya saing tersendiri yang

dapat menuju Kabupaten Majalengka menjadi daerah tujuan wisata Jawa Barat. Jadi Relevansinya adalah mutu keahlian pegawai Dinas Pariwisata untuk mengelola dan melayani wisatawan agar mau berkunjung ke tempat wisata tersebut.

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui kinerja Sub Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pariwisata dalam mengembangkan obyek-obyek wisata di Majalengka dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
2. Untuk mengetahui data atau keterangan yang berhubungan dengan pengembangan obyek wisata, mengingat referensi yang ada mengenai kinerja Sub Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pariwisata masih terbatas jumlahnya.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Bagi pembangunan / pemerintahan terkait, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan atau bahan pelengkap dalam mengambil langkah-langkah penyempurnaan pelaksanaan pembangunan.
2. Secara akademis, penelitian ini di harapkan dapat memberikan tambahan pemahaman tentang kinerja Sub Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pariwisata dalam mendukung peningkatan PAD.
3. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dan masukan sebagai pertimbangan bagi pihak-pihak terkait.

4. Bagi ilmu pengetahuan untuk menambah kasanah ilmu sosial dan ilmu politik pada umumnya dan ilmu pemerintah pada khususnya.
5. Bagi peneliti, penulisan ini merupakan syarat yang diperlukan untuk menyelesaikan kuliah S1 di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik pada Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

E. KERANGKA DASAR TEORI

1. Pengertian Teori

Sebelum penulis menjabarkan lebih lanjut tentang kerangka teori sebagai proses penguraian pemecahan masalah berdasarkan perumusan masalah yang ada pada dasarnya adalah : sasaran pokok untuk menyatakan hubungan sistematis antara fenomena sosial maupun fenomena alamiah yang hendak diteliti.¹¹

Kerangka dasar yang dimaksud adalah teori-teori yang digunakan di dalam melakukan penelitian sehingga aktivitas ini menjadikan jelas sistematis dan ilmiah.

Teori adalah konsep-konsep yang saling berhubungan menurut aturan logika menjadi suatu bentuk pernyataan tertentu sehingga bisa menjelaskan fenomena tersebut secara ilmiah.¹²

Teori sebagai suatu perangkat proposisi yang terintegrasi secara sintaksis, yaitu mengikuti aturan-aturan tertentu yang dapat dihubungkan secara logis satu

¹¹ Sofyan Effendi, Unsur-Unsur Penelitian Ilmiah, LP3ES, 1985, hal.18.

¹² Mochjar Mas' oed, Ilmu Hubungan Internasional Disiplin dan Metodologi, LP3S, Jakarta, 1990, hal.186.

dengan lainnya dengan data dasar sehingga dapat diamati dan dapat berfungsi sebagai wahana untuk menjelaskan fenomena yang diamati.¹³

Menurut pendapat Masri Singarimbun:

“ Teori adalah serangkaian, asumsi, konsep, definisi, dan proposisi yang merupakan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep “.

Menurut definisi ini, teori mengandung tiga hal yaitu :

- *Pertama* teori adalah serangkaian proposisi atau konsep yang berhubungan.
- *Kedua* teori adalah menerangkan secara sistematis suatu fenomena dengan cara menentukan hubungan antar konsep.
- *Ketiga* teori menerangkan fenomena tertentu dan cara menentukan konsep mana yang berhubungan dengan konsep lainnya dan bagaimana bentuk hubungannya.¹⁴

Dari beberapa pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa teori adalah gambaran fenomena yang diperoleh maupun hubungan-hubungan proposisi untuk menghubungkan variabel satu dengan variabel lain dan tujuannya untuk menjelaskan fenomena tersebut untuk memperoleh apa yang dimaksud.

¹³ Glen E. Snellbeckerr, dalam Lexy J. Moelong, Metodologi Penelitian Kualitatif, PT. Remaja Rosda Karya, Bandung, 1991, hal. 61.

¹⁴ Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi, Metodologi Penelitian Sosial, 1989, hal.37.

2. Pengertian Kinerja Organisasi

Kinerja dapat didefinisikan, sebagai berikut: “ Tingkat pencapaian hasil atau *degree of accomplishment* “. ¹⁵

Sedangkan Bernalin dan Russel memberikan batasan mengenai kinerja atau *performance* sebagai berikut:

“ *in the record of outcomes produced on a specified job function or activity during a specified time periode* “. ¹⁶

Artinya :

Pengeluaran yang dihasilkan dari fungsi suatu pekerjaan tertentu atau kegiatan selama suatu periode waktu tertentu “

3. Tujuan penilaian performance

Tujuan penilaian *performance* secara umum dapat dibedakan atas dua macam yakni :

- a. Untuk mereward *performance* sebelumnya
- b. Untuk memotivasi perbaikan *performance* pada waktu yang akan datang.

Informasi-informasi yang dapat diperoleh dari penilaian *performance* itu dapat dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan, seperti: penempatan-penempatan tugas-tugas tertentu. Dalam teori *performance* dijelaskan pula syarat-syarat bagi penilaian *performance* yang efektif. Untuk itu terdapat kurang lebih dua syarat utama yang diperlukan guna melakukan penilaian *performance* yang efektif yakni:

¹⁵ Rue dan Byars, Dalam Makalah Yaremiyas, 1985.

¹⁶ Bernalin dan Russel, Human Resource Management, Mac Graw Hill, Inc, Singapore, 1993, hal.379.

- a. Adanya kriteria *performance* yang dapat diukur secara obyektif
- b. Adanya obyektivitas dalam proses evaluasi.

Terdapat tiga kriteria penilaian performance, yaitu:

a. *Result Based Performance Evaluation*

Adalah hasil akibat yang utama dari suatu nilai yang menjadi ukuran dalam suatu kinerja atau performance.

b. *Behavior Based Performance Evaluation*

Adalah tabiat atau kelainan yang menjadi inti pada sebuah kinerja atau performance

c. *Judgement Based Performance Evaluation*

Merupakan pertimbangan-pertimbangan yang harus dimiliki oleh inti dari suatu penilaian kinerja atau performance.¹⁷

Sedangkan menurut Max Webber:

“ Organisasi sebagai birokrasi menentukan norma-normanya sendiri yang semuanya harus dilaksanakan. Organisasi selain mempunyai peraturan dan pengaturan, juga memberikan perintah supaya organisasi dapat berfungsi secara efektif, serta semua peraturan harus ditaati. Sampai suatu tingkat tertentu organisasi dapat bersandar dan menggunakan kekuasaan agar pada anggota mentaatinya.¹⁸

¹⁷ KAEE Chung dan Leon C. Maggnisan, *Kriteria Dalam Performance*, hal 372-376.

¹⁸ Dikutip kembali dalam buku kerja Robert K. Merton Analisa, p.Gruy, Barbara Hockey dan Hanan (selvin(eds), *Reader in Bureaucracy* (Glecoe III: the free Press 1952)), hal 18-20.

Untuk itu dimensi yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan organisasi akan dilihat melalui kajian Max Webber karena ia berhasil menyajikan perspektif studi yang sama sekali baru tentang kepuasan sebagai hasil dari partisipasi di dalam organisasi. Pandangannya mengenai “Legitimasi dan Wewenang”, yang mempengaruhi proses timbal balik untuk mengendalikan dan kemampuan untuk membenarkan atau melegitimasi dalam penerapannya tersebut telah menciptakan suatu konteks bagi problem organisasi yang penting yaitu: bagaimana cara mengendalikan para partisipan atau anggota agar efektivitas dan efisiensinya dapat ditingkatkan semaksimal mungkin serta sekaligus mengurangi ketidakpastian yang mengakibatkan oleh kebutuhan yang sangat vital. Dengan hal tersebut barulah organisasi dapat mengharapkan agar para anggotanya bersedia menerima keputusan organisasi. Sehingga organisasi mempunyai kemampuan untuk mengendalikan mereka (partisipan atau anggota tersebut).¹⁹

Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa definisi kinerja adalah suatu kemampuan organisasi atau perusahaan dalam melakukan tugas-tugas guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Bagi setiap organisasi, penilaian terhadap kinerja merupakan suatu kegiatan yang sangat penting karena penilaian tersebut dapat dipakai sebagai ukuran penilaian keberhasilan suatu organisasi dalam jangka waktu tertentu, bahkan penilaian tersebut juga dapat menjadi input bagi perbaikan atau peningkatan kerja organisasi.

¹⁹ Lexy, J. Noleong, Metode Penelitian Kualitatif, PT Remasa Rusda Karya Bandung, Bandung, 1991

Arti kata kinerja juga dapat dipahami dari tujuan pemeriksaan kinerja suatu organisasi atau perusahaan yang dikemukakan oleh Drs. Jony Setiyawan, sebagai berikut:

“ Tujuan kinerja yang tersurat sebenarnya adalah untuk menilai hasil-hasil kerja manajemen agar supaya dewan komisaris dapat memperoleh input yang mencukupi guna menilai tujuan yang diinginkan dan strategi yang ditempuh oleh manajemen “. ²⁰

“ Kinerja merupakan hasil pekerjaan yang dapat dihubungkan dengan kualitas atau profesionalisme dan dalam hal ini dapat dilihat dari disiplin kerja dan pendidikan ”. ²¹

Kinerja yang diraih Sub Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pariwisata dapat dilihat dari berbagai aspek, sebagai berikut:

- a. Aspek produktivitas (*productivity*), aspek ini berkaitan dengan perbandingan antara pemasukan (input) dan pengeluaran (output) suatu organisasi. Apabila pengeluaran atau hasilnya lebih besar dari pemasukan atau ongkosnya maka kondisi ini disebut efisiensi dan produktivitas tinggi. Namun bila pengeluaran lebih rendah dari pada pemasukan maka organisasi itu tidak efisien.
- b. Aspek kualitas pelayanan yang diberikan oleh suatu organisasi, aspek ini bisa dilihat sebagai aspek efektivitasnya. Dengan kata lain hal ini menyangkut aspek kualitas pelayanan (*Quality Service*).
- c. Aspek responibilitas (*responsibility*), aspek ini diartikan sebagai suatu kondisi administrasi dan kebijakan serta program-program yang baik yang

²⁰ Bernalin dan Russel, Op.cit, 1998,P.9

²¹ J.J. Spillane, Etika Dalam Profesionalisme Kerja, Basis, 1990.

dimiliki oleh para pengelola organisasi. Kondisi administrasi, kebijakan dan program yang baik di sini dimaksudkan dalam arti yang luas sebagai kemantapan sistem pekerjaan dan keahlian yang dimiliki oleh para pengelola organisasi.

- d. Aspek responsivitas (*responsivennes*), aspek ini dapat diartikan sebagai daya tangkap para pengelola organisasi terhadap kebutuhan dan keinginan dari pera klien atau masyarakat sasaran. Daya tanggap di sini dimaksudkan sebagai respon terhadap kebutuhan klien dan penerapan peraturan yang benar.
- e. Aspek profesionalisme (*profesionalism*), aspek ini merujuk pada sifat dari suatu pekerjaan yang membutuhkan kompetensi atau keahlian teknis.
- f. Aspek akuntabilitas (*accountability*), aspek ini dapat diartikan sebagai pertanggungjawaban dari pada pengelola organisasi tentang apa-apa yang telah dilakukannya terhadap pihak-pihak yang berkepentingan (*shareholders*).

4. Pariwisata

Pada mulanya, dasar yang prinsipil yang menimbulkan adanya pariwisata adalah perasaan manusia yang pada hakikatnya serba ingin tahu tentang segala sesuatu di luar lingkungannya, antara lain keingintahuan mengenai kebudayaan asing, cara hidup dan adat istiadat suatu rakyat, keindahan alam, keaslian dan kelangkaan.

Menurut Hornby AS:

“ Pariwisata merupakan sebuah perjalanan di mana seorang dalam perjalanannya singgah sementara di beberapa tempat dan akhirnya kembali lagi ke tempat asal di mana dia mulai melakukan perjalanan “. ²²

Menurut Undang-Undang No. 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan: wisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama pengusaha. ²³

wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan International Tourism (Pariwisata Internasional) adalah segala kegiatan dan macam lalu lintas wisata antar negara atau kegiatan wisata yang diselenggarakan oleh wisatawan di luar negara asalnya. ²⁴

Menurut pendapat Oka A. Yoety:

“ Perjalanan dari suatu tempat ke tempat lain bersifat sementara dilakukan oleh perorangan atau kelompok sebagai usaha mencari keseimbangan atau keserasian atau kebahagiaan dengan lingkungan hidup dalam dimensi sosial budaya alam dan ilmu “. ²⁵

5. Jenis-jenis Pendapatan Asli Daerah

Sejalan dengan pemberian urusan kepada daerah teramsuk sumber keuangannya, maka dalam bunyi pasal 79 Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 dicantumkan sumber-sumber pendapatan daerah terdiri atas :

²² Suyitno, Perencanaan Wisata, Kanisius, Yogyakarta, 2001, hal.8.

²³ UU Kepariwisata no 10 tahun 2009

²⁴ Kodhyat, Ramaini, Kamus Pariwisata dan Perhotelan, hal.62.

²⁵ Oka A, Toety, Pengantar Ilmu Pemerintahan, Penerbit Angkasa, Bandung 1985.

A. Pendapatan asli daerah yaitu :

- a.1. Hasil pajak daerah
- a. 2. Hasil retribusi daerah
- a. 3. Hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan
- a. 4. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

B. Dana Perimbangan

C. Pinjaman daerah

D. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, sumber keuangan yang berasal dari pendapatan asli daerah lebih penting dibandingkan dengan sumber-sumber diluar pendapatan asli daerah, karena pendapatan asli daerah dapat dipergunakan sesuai dengan prakarsa dan inisiatif daerah sedangkan bentuk pemberian pemerintah (non PAD) sifatnya lebih terikat. Dengan penggalan dan peningkatan pendapatan asli daerah diharapkan pemerintah daerah juga mampu meningkatkan kemampuannya dalam penyelenggaraan urusan daerah.

Jenis Pendapatan asli daerah terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Bagian Laba Perusahaan Daerah, Penerimaan Lain-lain. Adapun Pajak Daerah yang dikelola oleh Pemda Kabupaten Majalengka beserta potensinya antara lain: Pajak Hotel dan Restoran, merupakan pajak yang potensial untuk dikembangkan seiring dengan berkembangnya Pembangunan Kabupaten Majalengka. Disamping itu Kabupaten Majalengka merupakan daerah andalan wisata dan daerah industri, tentu saja restoran dan hotel-hotel akan terus berkembang seiring dengan kebutuhan yang ada. Sehingga sektor ini mempunyai prospek yang cukup bagus

bagi penerimaan daerah. Disisi lain, jenis pajak ini pemungutannya relatif tidak sulit, hal ini dikarenakan tempat obyek pajak jelas, dan tempat pemungutannya biasanya sama dengan tempat beban pajak sehingga biaya pengelolannya tidak mahal. Pajak Hiburan, Pajak ini sangat potensial untuk dikembangkan karena umumnya di kota-kota besar tempat-tempat hiburan cenderung menjamur. Disamping itu penarikan pajak ini mudah dan biaya penarikannya rendah hal ini dikarenakan selain obyeknya mudah diketahui penarikannya juga dapat dilakukan langsung oleh pemilik tempat hiburan melalui karcis

F. DEFINISI KONSEPSIONAL

1. Kinerja Organisasi

Adalah pelaksanaan tugas dan fungsi Sub Dinas Perindustrian, perdagangan dan Pariwisata sebagai lembaga pemerintah yang mengkoordinasikan program Perindustrian, perdagangan dan Pariwisata, dan membantu mensosialisasikan dan daya tarik wisata serta memproses perijinan hotel, melatih dan menyelenggarakan pendidikan dan latihan pemandu wisata di lingkungan kabupaten Majalengka yang pada kinerjanya tersebut organisasi mempunyai kriteria untuk pencapaian tujuan dalam menghasilkan keberhasilan dalam kurun waktu dan dalam menjalankan terdapat pengaruh-pengaruh yang datang baik secara eksternal maupun internal yang ada dan terjadi di organisasi

2. Pariwisata Yaitu kegiatan perjalanan seseorang atau serombongan orang dari tempat tinggal asalnya ke suatu tempat di kota lain atau negara lain

dalam jangka waktu tertentu dengan salah satunya untuk bersenang-senang.

3. PAD yaitu merupakan sumber pendapatan yang paling penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah.

G. DEFINISI OPERASIONAL

Setelah variabel-variabel penelitian dikonseptualisasikan maka langkah berikutnya adalah pengoperasionalan ke dalam indikator-indikator beserta pengukurannya yang mampu menggambarkan dan mewakili gejala-gejala yang dapat diuji kebenarannya.

Definisi operasional dari masing-masing variabel penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kinerja Organisasi

Indikator-indikator:

A. Aspek Produktivitas

- a.1. Upaya meningkatkan produktivitas
- a.2. Meningkatkan fasilitas

B. Aspek Kualitas Pelayanan

- b.1. Keterampilan yang dimiliki
- b.2. Kredibilitas/dapat dipercaya

C. Aspek Akuntabilitas

- c.1. Keterbukaan
- c.2. Bentuk pertanggung jawaban

D. Aspek Responsivitas

d.1. Daya tanggap para petugas

d.2. Pemberian izin dalam mendirikan usaha pondok wisata

E. Aspek Responbilitas

e.1. Dedikasi kerja dan semangat kerja petugas organisasi

e.2. Pembinaan dan Pengembangan sarana di lingkungan pariwisata

f. Aspek Profesionalitas

f.1. Pengetahuan dan keahlian petugas

f.2. Kemampuan dalam bekerja sama

2. Efektivitas dan Efisiensi

Indikator-indikator:

a. Analisis efektivitas dan efisiensi Dinas Pariwisata

b. Efisiensi organisasi dilihat dari sumber dayanya

H. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian secara Deskriptif Analisa adalah studi untuk menelaah fakta-fakta yang di lapangan dan kemudian dilakukan interprestasi pada hal tersebut dengan secara seksama.²⁶

²⁶ Mohammad Nasir, Metode Penelitian, Ghalia Indonesia, 19988, hal.105.

Dan studi Deskriptif ini bertujuan untuk:

- a. Melukiskan atau menggambar secara akurat sifat-sifat dan beberapa fenomena, organisasi dan kelompok atau individu-individu.
- b. Menentukan frekuensi terjadinya suatu keadaan untuk meminimalkan hal-hal yang mempengaruhi dan memaksimalkan konsistensi atau kontinuitas yang ada tersebut pada penelitian.

2. Alasan Pemilihan Lokasi

Penelitian ini dilakukan di Sub Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pariwisata Kabupaten Majalengka. Pemilihan Sub Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pariwisata Kabupaten Majalengka sebagai lokasi penelitian didasarkan atas keinginan untuk mengetahui lebih jelas bagaimana kemampuan yang dimiliki oleh aparat Sub Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pariwisata Kabupaten Majalengka dalam mengembangkan obyek-obyek wisata untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

3. Unit Analisis

Yang dijadikan sumber data atau informasi dalam penelitian ini adalah :

- a. Kepala dan Staf Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pariwisata Kabupaten Majalengka.
- b. Pengelola obyek-obyek wisata yang ada di Kabupaten Majalengka.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penyusun menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu:

a. Questioner

Merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh data berupa jawaban dari para pengunjung obyek-obyek wisata²⁷.

b. Observasi

Yaitu, suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan baik secara langsung terhadap obyek yang diselidiki. Interview. Beberapa informasi yang diperoleh dari hasil observasi adalah ruang (tempat), pelaku, kegiatan, objek, perbuatan, kejadian atau peristiwa, waktu, dan perasaan. Alasan peneliti melakukan observasi adalah untuk menyajikan gambaran realistik perilaku atau kejadian, untuk menjawab pertanyaan, untuk membantu mengerti perilaku manusia, dan untuk evaluasi yaitu melakukan pengukuran terhadap aspek tertentu melakukan umpan balik terhadap pengukuran tersebut.

Menurut Soetrisno Hadi, wawancara adalah:

“ Suatu proses tanya jawab secara lisan di mana seseorang atau beberapa orang saling berhadapan dan dapat mendengar secara langsung, merupakan alat pengumpulan data/informasi yang langsung tentang berbagai jenis data sosial baik yang terpendam maupun termanifest “.

²⁷ para pengunjung obyek-obyek wisata dan masyarakat setempat

c. Dokumentasi

Yaitu teknik pengumpulan data melalui dokumen-dokumen atau catatan-catatan yang tersedia yang menjadi obyek penelitian. Teknik ini digunakan untuk memperoleh data sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Teknik Analisis Data

Tujuan dari analisa data pada dasarnya adalah menyederhanakan data dalam bentuk yang mudah dibaca dan dipahami. Menurut S. Nasution, analisa adalah: “ Proses menyusun data agar dapat ditafsirkan. Melakukan analisa adalah pekerjaan yang sulit, memerlukan kerja keras, daya kreatif serta intelektual yang tinggi “. ²⁸

Dan apa yang dikatakan Nasution di atas, nampak jelas bahwa tidak ada satupun cara atau metode yang dapat dijadikan pegangan dalam menganalisa data yang terkumpul. Oleh karena itu pada penelitian ini, penyusun akan menggunakan model analisa kualitatif, yaitu usaha mengambil kesimpulan berdasarkan pemikiran logis atas berbagai data yang diperoleh. Analisa kualitatif ini dilakukan secara interpretatif, menurut Brian Fay. ²⁹

Pendekatan interpretative dalam ilmu sosial di mulai dengan pemahaman terhadap data/fakta yang dikumpulkan dan kemudian dicoba

²⁸ S. Nasution, Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif, Tarsito, Bandung, 1982, hal.126

²⁹ Bryan Fay, Teori

dan dianalisa melalui pemahaman intelektual yang dibangun atas dasar pengalaman empiris.

Dalam menganalisa data tersebut, penyusun menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Reduksi Data
- b. Display Data
- c. Kesimpulan dan Verifikasi

Pertama, Reduksi Data yaitu data yang diperoleh dari data sekunder diketik dalam bentuk uraian terinci. Uraian akan terus menerus bertambah dan menambah kesulitan bila tidak segera dianalisa sejak semula. Uraian itu perlu direduksi, dirangkum, dipilih-pilih yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting lalu dicari polanya. Jadi uraian dalam data sekunder sebagai bahan mentah disingkatkan, disusun lebih sistematis, ditonjolkan pokok-pokok yang penting, sehingga lebih mudah dikendalikan. Data yang direduksi memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil tersebut, juga mempermudah penyusun untuk mencari kembali data yang diperoleh bila diperlukan. Reduksi dapat pula membantu dalam memberikan kode pada aspek-aspek tertentu.

Kedua, Display Data. Nasution mengatakan: Data yang bertumpuk-tumpuk, laporan yang tebal, sulit ditangani, sulit pula melihat hubungannya secara detail. Dengan sendirinya sulit bila melihat gambaran keseluruhan untuk mengambil kesimpulan yang tepat. Berdasarkan

pendapat Nasution di atas, maka agar dapat melihat gambaran keseluruhannya atau bagian-bagian tertentu dari penelitian yang dilakukan, penyusun juga berusaha membuat bagan, tabel dan sebagainya. Dengan demikian penyusun dapat menguasai data dan tidak tenggelam dalam tumpukan laporan-laporan data sekunder yang banyak.

Ketiga, mengambil Kesimpulan dan Verifikasi. Sejak semua penyusun akan berusaha untuk mencari makna data yang dikumpulkan. Untuk itu harus mencari pula tema hubungan persamaan hal-hal yang timbul. Jadi dari data yang diperoleh penyusun akan berusaha mengambil kesimpulan. Untuk mengakuratkan kesimpulan, maka bertambahnya data yang diperoleh harus senantiasa diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi dapat diusahakan sesingkat mungkin kemampuan, waktu, biaya yang dimiliki penyusun sangat terbatas.

Ketiga macam langkah di atas, senantiasa saling berhubungan dan berlangsung terus selama penelitian dilakukan. Jadi analisa data dalam penelitian ini sebenarnya sudah berlangsung secara kontinue dari awal sampai akhir penelitian.

Produktivitas Pariwisata Pengaruhnya Terhadap PAD :

Karya ini menelaah cara-cara yang produktivitas dalam bisnis pariwisata dapat ditingkatkan dengan mempelajari peran perubahan dalam modal fisik, modal manusia, inovasi, dan lingkungan yang kompetitif. Hasil komprehensif diperoleh dengan menggunakan wawancara berdasarkan kuesioner, analisis data survei bisnis, dan dihitung model ekuilibrium umum. Hasilnya menunjukkan kontribusi positif bahwa masing-masing driver produktivitas dapat membuat untuk meningkatkan efisiensi dan kesejahteraan, terutama peningkatan modal manusia dan inovasi. Mereka juga menunjukkan bahwa strategi gabungan menggabungkan semua driver lebih efektif daripada kebijakan dirumuskan secara independen. Organisasi pemerintah dapat bekerja sama untuk membantu peningkatan produktivitas, dengan langkah-langkah dirancang secara khusus untuk usaha kecil.

Outputnya : Pemerintah Dinas Pariwisata mempromosikan Obyek Wisata melalui media cetak maupun elektronik guna para Wisatawan dapat berkunjung ke tempat wisata yang telah di peradakan di Kab. Majalengka.

Inputnya : Pemerintah mendapatkan devisa dari hasil obyek pariwisata yang dihasilkan untuk penyelenggaraan pemerintahan yang mana dari sektor ini bias mengurangi pendapat dari non migas yang telah relative berkurang.